

## Perhutani Lawu Ds dan CDK Pacitan Gelar Opening Meeting Monitoring Monev RTT

Octavia Ramadhani - BEKASI.TELISIKFAKTA.COM

Feb 11, 2026 - 11:53



Lawu Ds (10/02/2026) - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds bersama Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Pacitan menggelar Opening Meeting Monitoring Rencana Teknik Tahunan (RTT) Semester II Tahun 2025 sebagai upaya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kehutanan, bertempat di Kantor CDK Wilayah Kerja Ponorogo, Senin (09/02/2026).

Kegiatan ini diikuti Kepala CDK Wilayah Pacitan beserta All Tim, Administratur KPH Lawu Ds, Wakil Administratur Wilayah Ponorogo-Pacitan, KPH Madiun,

Kepala Perencanaan Hutan (PHW) II Madiun, serta seluruh Kepala Seksi Madya Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (PBB).

Administratur Perhutani KPH Lawu Ds, Adi Nugroho, menyampaikan paparan hasil kinerjanya semua bidang di tahun 2025. Ia juga mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin dalam pengelolaan sumber daya hutan di wilayah KPH Lawu Ds.

Menurutnya, dengan adanya sistem monitoring dan evaluasi (Sismonev) bersama CDK, kami berharap kegiatan kehutanan mulai dari wisata, persemaian, tanaman, pemeliharaan hingga tebangan dapat berjalan sesuai rencana. Apabila ada kekurangan, bisa segera diperbaiki dan kami siap terus berupaya untuk menyukupi data-data yang dibutuhkan CDK wilayah Pacitan mungkin selama ini ada kekurangannya, ujarnya.

“Ia menambahkan dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di wilayah kerja Perhutani mungkin nanti bersinggungan dengan CDK misalnya markas tempe di Pacitan dan koperasi merah putih yang lagi hangat-hangatnya akan seperti apa, artinya kemudian harus kita singkronkan dengan CDK dengan [Perhutani](#), karena satu sisi wilayah itu akan beririsan atau projek PSN akan bersinggungan dengan kita semuanya. Sehingga apa yang harus kita lakukan bisa satu persepsi sehingga kedepan ini bila ada permasalahan-permasalahan mungkin akan muncul bisa kita antisipasi,” tutup Adi.

Sementara itu, Kepala CDK Wilayah Pacitan, yang diwakili Kepala Seksi Tata Kelola dan Usaha Kehutanan Agus Riyadi, memberi apresiasi atas sinergi Perhutani. Ia berharap RTT Semester II/2025 berjalan lancar serta mendukung program kehutanan di Jawa Timur.

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui capaian/ realisasi pelaksanaan RTT Tahun 2025 Perum Perhutani KPH Madiun dan KPH Lawu Ds di wilayah kerja Cabang Dinas Kehutanan Pacitan beserta kendala yang dihadapinya. Sedangkan tujuannya adalah terselenggaranya tertib pelaksanaan RTT oleh Perum Perhutani di Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari.

Prioritas pelaksanaan Evaluasi RTT Tahun 2025 sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Hutan Lestari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 500.4.4/24/123.4/2026 tanggal 26 Januari 2026 hal Evaluasi Pelaksanaan Rencana Teknik Tahunan (RTT) Tahun 2025 Perum Perhutani di Jawa Timur difokuskan pada kegiatan tanaman, produksi kayu, produksi bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada areal kelola Perum Perhutani tanpa mengabaikan kegiatan lainnya. Tujuan memprioritaskan kegiatan penanaman dan produksi hasil hutan pada kegiatan RTT, agar terwujudnya tata kelola hutan yang berkelanjutan dengan tutupan lahan dan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kebijakan Presiden Prabowo Subianto khususnya asta cita kedua terkait swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru perlu kiranya kita dukung bersama melalui penyediaan lahan dan pendukungnya serta tidak lupa tetap dilaksanakan sesuai kaidah pengelolaan hutan dengan perencanaan yang tepat pula.

Selanjutnya mohon dukungan juga terkait penyediaan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Evaluasi RTT Tahun 2025 secara cepat, teliti dan dapat dipertanggung jawabkan, antara lain RPKH, RTT, Project statement, dokumen Perjanjian Kerja Sama, laporan realisasi RTT, database Sistem Informasi Evaluasi dan Evaluasi (SISMONEV KPH). Dan yang tidak kalah penting adalah secara terbuka menyampaikan kebijakan oleh direksi yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan hutan secara langsung dan nyata. @ Red.